

PROBLEMATIKA PROFESIONALITAS PUSTAKAWAN :

Ditinjau Dari Aspek Normatif Dan Sosial

Oleh : Sugeng Priyanto, SS

Abstrak

Profesi pustakawan menghadapi tantangan dan permasalahan yang cukup berat dalam perkembangannya dewasa ini. Tuntutan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada pemustaka yang dibarengi dengan teknologi informasi. Banyak tanggapan negatif tentang pustakawan. Tidak ramah, judes, pasif, dan masih banyak lagi sederet atribut yang tidak menyenangkan tentang pustakawan. Kinerja pustakawan masih dianggap rendah. Problematika tersebut dapat dipandang dari aspek normative (teori) dan aspek social untuk mencari penyebab dan pemecahannya. Kompetensi pustakawan ternyata belum memiliki standar kompetensi yang jelas dan tidak ada lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan uji kompetensi. Aspek social profesionalisme pustakawan juga mengalami masalah. Etnosentrisme pustakawan dan birokrasi yang paternalistic menimbulkan permasalahan bagi pustakawan dalam segi social.

PENDAHULUAN

Ketika memperoleh tugas dari seorang dosen, penulis ditugaskan untuk mencari biografi seorang tokoh di bidang perpustakaan. Setelah melakukan penelusuran literature kesana kemari baik secara manual dan online, penulis kesulitan mendapatkan biografi resmi dari tokoh-tokoh perpustakaan di Indonesia. Bahkan Prof. Sulistyono Basuki, Ph.D yang sangat kita kenal dalam dunia perpustakaan (yang ternyata sangat sempit dan tidak terkenal) itupun tidak masuk ke dalam biografi-biografi resmi dan tidak resmi baik terbitan tercetak maupun online. Bidang perpustakaan pun tidak termasuk dalam pembagian bidang berdasarkan profesi tokoh itu.

Benarkah apa yang disampaikan oleh Hernandono, bahwa Pustakawan Indonesia pada umumnya seperti mengidap gejala atau sindrom autis, sibuk dengan dunianya sendiri, dan tidak suka bila ada orang lain mengganggu. Pustakawan Indonesia amat tertutup, sulit dan lambat merespon pandangan atau gagasan orang lain yang dirasakan akan mengganggu wilayah atau demarkasi "mainannya", berupa kegiatan, proyek dan sejenisnya. Boleh jadi hal itu terjadi karena sebagian Pustakawan merasa kurang percaya diri¹.

¹ Hernandono, 2005

Sulistyo-Basuki dalam sekapur sirih di buku Tinjauan Kultural Terhadap Kepustakawanan² menyampaikan bahwa perpustakaan dan pustakawan merupakan pihak yang sangat resistan terhadap perubahan yang datang dari luar perpustakaan. Hampir seratus lima puluh tahun yang lalu, pustakawan dengan gigih menentang peralatan baru di perpustakaan karena alat tersebut dianggap merusak praktik kepustakawanan yang sudah ada, tidak menimbulkan inspirasi baru serta dapat merusak pendapat pemakai tentang perpustakaan. Alat baru tersebut tidaklain adalah mesin ketik !

Kenyataan ini sungguh sangat mengusik penulis. Banyak pertanyaan berkecamuk di dalam kepala, mengapa tidak ada tokoh perpustakaan yang terkenal di masyarakat umum, apakah memang bidang perpustakaan tidak dikenal oleh masyarakat dan profesi pustakawan bukan merupakan profesi yang diakui masyarakat meskipun sudah ada organisasi profesi yang resmi (IPI) yang memiliki kode etik profesi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART).

Di dalam masyarakat terpelajar pun pustakawan masih belum dianggap sebagai profesi yang terhormat, yang sejajar dan sederajat dengan profesi lain di dalam dunia pendidikan misalkan guru dan dosen. Perpustakaan masih dianggap sebagai bagian pelengkap keadministrasian dalam suatu institusi/lembaga pendidikan. Profesi Pustakawan masih dianggap sebagai tenaga non professional yang tidak memiliki keahlian khusus dan dapat dikerjakan oleh setiap orang. Bahkan yang lebih parah, tumbuh suatu paradigma di dalam dunia birokrasi bahwa perpustakaan merupakan tempat buangan bagi pegawai yang mengalami masalah dalam pekerjaan.

Jabatan Fungsional Pustakawan yang telah resmi dilaksanakan sejak 1988 dalam system pembinaan kepegawaian negeri sipil ternyata belum jelas dan tegas apakah jabatan fungsional itu adalah jabatan profesional. Kalaupun ada pengakuan itu masih sebatas *lip service* belaka. Hal ini terbukti bahwa pengakuan dan perlakuan kepada pejabat fungsional pustakawan ternyata belum professional. Aspek keprofesionalan terdiri dari dua hal yaitu berkenaan dengan kemampuan melaksanakan tugas dan berkaitan dengan apresiasi dalam bentuk pengakuan.

Dari kenyataan empiris tersebut maka terdapat pertanyaan dan permasalahan yang coba dibahas dalam tulisan ini.

1. Apakah benar pustakawan belum menjalankan profesinya secara professional sehingga tidak memberikan makna (manfaat) yang signifikan di masyarakat.
2. Permasalahan apakah yang terjadi dalam dunia kepustakawanan (perpustakaan dan pustakawan) di Indonesia baik secara internal maupun eksternal ?

² Laksmi, 2007

3. Benarkah Pustakawan Indonesia adalah mahluk sosial yang dapat berinteraksi dengan baik dengan profesi atau bidang yang lainnya atautkah merupakan mahluk asosial yang mengalami gejala autisme yang sibuk dengan dunianya sendiri.

PERMASALAHAN

Kompetensi

Rumusan mengenai kompetensi yang baku dan lembaga yang berhak melakukan uji kompetensi sampai sekarang masih belum ada. Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia (ISIPI) pun mengakui bahwa belum ada acuan mengenai kompetensi pustakawan. Bagaimana sistem dan aturan mainnya, kemudian siapa yang berhak melakukan uji kompetensi, serta materi ujiannya belum terdefinisi secara gamblang. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, kemampuan atau karakteristik yang berhubungan dengan kinerja³.

Kepustakawanan yang Etnosentrik

Etnosentris adalah sikap yang berdasarkan pekerjaannya, menganggap diri berbeda dengan yang lain, resisten terhadap perubahan dan biasanya egosentris dan kurang bisa bekerja sama⁴. Pustakawan bekerja di dalam dunianya sendiri dan memegang kendali penuh atas koleksinya dan tidak begitu fleksibel ketika harus merubah aturan peminjaman koleksi.

Pekerjaan pustakawan yang berurutan dari pengadaan, pengolahan dan layanan merupakan aktivitas yang sifatnya mekanis, bekerja berurutan dari awal hingga akhir dan kembali ke titik awal. Seluruhnya dilakukan dengan metode dan peraturan tertentu yang biasanya dituangkan dalam buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Sifat pekerjaan yang teratur dan terstruktur menimbulkan anggapan bahwa pekerjaan perpustakaan sama dengan tukang, bersifat birokratis dan eksklusif. Disebut sama dengan tukang karena bersifat mekanis sehingga seolah-olah tanpa berpikir. Birokratis karena alur kerjanya terlihat berbelit-belit dan sangat procedural. Eksklusif karena menggambarkan seakan-akan pekerjaan perpustakaan tidak dapat diintervensi dari luar.

Anggapan-anggapan negative itu menimbulkan perasaan rendah diri dan kemungkinan juga menyebabkan ilmu perpustakaan terjebak dalam dikotomi science dan non science.

³ Seminar Kompetensi Pustakawan Indonesia di Gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia /PDII – LIPI, Jakarta, 29 – 9 – 2010

⁴ Trice, Harrison M. dan Janice M Beyer. 1993. *The Culture of Work Organizations*

Birokrasi Perpustakaan yang Paternalistik

Dengan munculnya jabatan fungsional pustakawan seharusnya terjadi perubahan perilaku dalam pustakawan dari yang bersifat birokratis menjadi profesional. Sayangnya pustakawan (PNS) yang bekerja di lembaga/institusi/departemen sangat konservatif dan tidak mau berubah. Mereka masih menegaskan dirinya sebagai 'pejabat' yang terdengar birokratis dibandingkan dengan profesional. Perpustakaan sebagai suatu organisasi juga tidak memiliki keberanian untuk berubah. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan-peraturannya yang terlihat masih kaku.

Faktor yang membuat perpustakaan di Indonesia sangat konservatif dan sulit untuk berubah tampak pada struktur organisasi perpustakaan, yang umumnya dibagi secara sederhana secara fungsional yaitu pengadaan, pengolahan dan pelayanan. Dominasi pimpinan di lembaga induknya dalam menentukan kebijakan perpustakaan menjadi faktor lainnya.

PEMBAHASAN

Pendekatan Normatif (Teori)

Profesi pustakawan mulai tumbuh pada akhir abad ke 19. Dalam sejarah perkembangannya profesi ini mendapat kritikan tajam dari para sosiolog yang meneliti masalah profesi. Sejumlah sosiolog meragukan pustakawan sebagai profesi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pustakawan tidak akan menjadi profesi penuh. Menurut data di Pusat Pengembangan Pustakawan⁵, Jumlah Pustakawan (PNS) di Indonesia per tahun 2010 mencapai 3057 orang. Diluar itu masih banyak pula pustakawan non PNS yang bekerja di instansi swasta. Pendidikan formal pustakawan juga telah ada di mana-mana dari tingkat D2 hingga S2 Perpustakaan.

Ledakan informasi yang terjadi pertengahan kedua abad ke 20, telah merubah stereotip pustakawan dari *book custodian* (penjaga buku) menjadi *information specialist* (Ahli Informasi) yang diperlukan oleh setiap bidang kehidupan umat manusia. Akan tetapi yang terjadi di mayoritas perpustakaan saat ini adalah pustakawan masih bersifat pegawai suatu organisasi atau lembaga, belum dapat menjanjikan layanan secara mandiri, seperti dokter, atau pengacara.

Pengertian Pustakawan yaitu

⁵ <http://pustakawan.pnri.go.id>

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan⁶.

Di Indonesia, profesi pustakawan masih sering dilihat sebelah mata oleh sebagian masyarakat kita, bahkan oleh kalangan terpelajar sekalipun. Meskipun mereka sering datang ke perpustakaan, tetapi belum banyak memerlukan jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan pustakawan. Bahkan ada yang belum mengetahui eksistensi profesi pustakawan. Selain masyarakat yang belum mengetahui eksistensi pustakawan, kadang kita pun masih menemukan pustakawan yang enggan atau malu mengakui dirinya sebagai pustakawan.

Kini profesi pustakawan telah diakui sebagai profesi penuh. Lebih dari itu, profesi ini telah berkembang dengan pesat seperti profesi lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pustakawan diantaranya adalah merumuskan kode etik pustakawan, menyelenggarakan seminar-seminar, lokakarya-lokakarya dll di dalam upaya menyempurnakan prosedur penyelenggaraan perpustakaan dan meningkatkan teknik-teknik pelayanan informasi. Namun mengapa keprofesionalan dan profesi pustakawan masih kurang mendapat pengakuan yang wajar di masyarakat.

Profesi⁷ didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu. Profesi diartikan pula sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer

Sedangkan pekerjaan merupakan sesuatu yg dilakukan untuk mendapat nafkah (KBBI). Jadi pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang tidak bergantung pada keahlian tertentu. Setiap orang dimungkinkan memiliki pekerjaan namun tidak semuanya tertumpu pada satu profesi. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang. Jadi Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi.

⁶ UU 43 tahun 2007 Pasal 1

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kompetensi Pustakawan Profesional

Pengertian Profesional menurut UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sementara definisi Kompetensi menurut KBBI adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu)

Untuk melakukan pekerjaan secara profesional yang perlu diperhatikan tidak hanya kompetensi profesional tapi juga kompetensi individual. Menurut US Special Library Associations, kompetensi profesional terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, serta pengetahuan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Sementara kompetensi individual menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebih serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.

Sementara pada Lokakarya Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia, *The British Council* dan Perpustakaan Nasional di Jakarta pada tanggal 9-11 Agustus 1994, merumuskan Profil Pustakawan Indonesia sebagai berikut :

1. Aspek Profesional.

Bahwa Pustakawan Indonesia memiliki pendidikan formal ilmu perpustakaan. Pustakawan juga dituntut gemar membaca, trampil, kreatif, cerdas, tanggap, berwawasan luas, berorientasi ke depan, mampu menyerap ilmu lain, objektif (berorientasi pada data), generalis di satu sisi, tetapi memerlukan disiplin ilmu tertentu di pihak lain, berwawasan lingkungan, mentaati etika profesi pustakawan, mempunyai motivasi tinggi, berkarya di bidang kepustakawanan, dan mampu melaksanakan penelitian serta penyuluhan.

2. Aspek Kepribadian dan Perilaku.

Pustakawan Indonesia harus bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bermoral Pancasila, mempunyai tanggung jawab sosial dan kesetiakawanan, memiliki etos kerja yang tinggi, mandiri, loyalitas tinggi

terhadap profesi, luwes, komunikatif dan bersikap suka melayani, ramah, dan simpatik, terbuka terhadap kritik dan saran, selalu siaga dan tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, berdisiplin tinggi dan menjunjung tinggi etika pustakawan Indonesia.

Menurut Barden pustakawan memerlukan empat dimensi kompetensi⁸, yaitu:

1. Technology skills and network management (keterampilan teknologi dan manajemen jaringan)
2. Customer care (kepedulian terhadap pelanggan)
3. Media management (manajemen media)
4. Storage and retrieval and business development (penyimpanan dan pemerolehan kembali, serta pengembangan bisnis)

Pendekatan Sosial

Perkembangan dunia perpustakaan di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini hanya mengedepankan sisi fisik (prasarana, koleksi dan teknologi). Apalagi sejak pesatnya perkembangan Teknologi Informasi yang turut mempengaruhi dunia perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan yang dulu manual dan bersifat konvensional, saat ini dengan perangkat Teknologi Informasi menjadi otomatis, inovatif dan modern tanpa batas ruang dan waktu.

Seperti yang diutarakan oleh Steinerova (2001), perkembangan fisik lebih maju daripada perkembangan manusia. Mitos tentang perpustakaan yang hingga kini masih ada adalah bahwa perpustakaan adalah gudang buku dan pustakawannya adalah penjaga gudang dengan segala stereotype negative.

Dari aspek social budaya perpustakaan tidak dilihat dari sisi fisik saja. Perpustakaan sebagai suatu tempat merupakan titik pertemuan antara berbagai individu, kelompok dan profesi dengan bidang pekerjaan yang berbeda. Adanya interaksi social di dalamnya di antara individu dan kelompok tersebut mensyaratkan adanya suatu komunikasi yang baik agar dapat terjalin hubungan. Terdapat dua kelompok yang melakukan interaksi di perpustakaan yaitu antara pustakawan dengan pengguna.

Pihak pertama yaitu pustakawan sebagai pengelola sumber daya informasi, bertugas untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi penggunanya selain menyebarluaskan / mendistribusikan informasi yang dikelolanya. Pihak kedua yaitu pengguna, membutuhkan isi informasi dari koleksi yang dimiliki perpustakaan guna menunjang tugas keilmiahannya. Hubungan yang saling terkait ini akan

⁸ Dewiyana (2006:26)

berhasil jika setiap pihak memperoleh makna (manfaat) bagi kehidupannya. Pustakawan merasa berhasil dalam tugas keprofesiannya dan pengguna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Pada intinya, pekerjaan di perpustakaan adalah melayani pengguna. Konsep melayani bukan sekedar menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna atau masyarakat pada umumnya, tapi terkait juga dengan kognisi, emosi dan budaya karena pengguna dari perpustakaan adalah manusia, bukan benda mati.

PENUTUP

1. Hakekat pekerjaan perpustakaan menurut Ranganathan adalah layanan kepada pengguna , pustakawan dituntut untuk bekerja secara profesional. Sistem birokrasi maupun SOP di perpustakaan yang sudah ada tidaklah salah jika diterapkan, tetapi kurang tepat apabila jika birokrasi tersebut berlebihan dan kaku. Birokrasi tersebut harus sesuai dengan lingkungan organisasi.
2. Lima Prinsip Ranganathan yang menjadi landasan hukum perpustakaan ternyata masih sangat relevan untuk diterapkan dalam era teknologi informasi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu⁹ :
 - *Books (Information) are for use*, informasi adalah untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Informasi yang tidak digunakan adalah mubasir. Semua hal yang ditujukan untuk mendukung diseminasi informasi seperti gedung, koleksi, lokasi dan juga pekerjaan pustakawan itu sendiri.
 - *Every reader (user) his [or her] book (information)*, informasi adalah untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku bangsa, warna kulit, usia, latar belakang dan pendidikan.
 - *Every book (information) its reader (user)*, pengguna berhak untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu pustakawan harus mempromosikan koleksinya agar diketahui oleh pengguna.
 - *Save the time of the reader (user)*, kecepatan pemerolehan informasi sangat diutamakan pengguna. Saat ini masyarakat menganggap waktu adalah uang, semakin cepat dia memperoleh informasi maka dia akan dapat bergerak lebih jauh dari pada yang tidak memiliki informasi.
 - *The library (information) is a growing organism*, pusat-pusat informasi seperti perpustakaan selalu tumbuh dan berubah dengan tuntutan layanan yang lebih baik sehingga kompetensi pustakawannya pun dituntut untuk lebih baik.

⁹ Laksmi, 2006 : 16

Daftar Pustaka

- Dewiyana, Himma. (2006). *Kompetensi dan Kurikulum Perpustakaan: Paradigma baru dan dunia kerja di era globalisasi informasi*. Pustaka Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi. Vol. 2 No. 1, p. 22-30.
- Jones, Ken. *Conflict and change in library organizations: people, power and service*.
- Laksmi. (2006). *Tinjauan Kultural Terhadap Kepustakawan*. Jakarta: Sagung Seto
- Steinerova, Jela. (2001). *Human Issues of library and Information Work*. Information Research, 6 (2)
- Sudarsono, B. (2005). *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto
- Trice, Harrison M. dan Janice M Beyer. (1993). *The Culture of Work Organizations*.
- http://noorikaahmad.multiply.com/journal/item/8/Profesi_dan_Profesionalisme_Pustakawan diakses pada tanggal 2 Desember 2010 jam 15.00